

Generasi muda dan penguatan demokrasi di Indonesia: Partisipasi politik, literasi digital, dan nilai kewarganegaraan

Alifia Yusnita Salsabilah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: yusnita0903@gmail.com

Kata Kunci:

Generasi muda; demokrasi;
literasi digital; partisipasi politik;
Pancasila

Keywords:

Youth; democracy; digital
literacy; political participation;
Pancasila

ABSTRAK

Artikel ini membahas posisi generasi muda dalam penguatan demokrasi Indonesia dengan menempatkan mereka sebagai aktor warga negara yang tidak hanya hadir pada saat pemilihan umum, tetapi juga aktif membentuk ruang publik digital dan sosial. Persoalan utama yang dikaji ialah bagaimana besarnya jumlah pemilih muda dan tingginya penggunaan media sosial dapat diarahkan menjadi partisipasi politik yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Sumber yang digunakan

meliputi artikel ilmiah, data resmi Komisi Pemilihan Umum, laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, informasi penanganan hoaks pemilu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta rujukan mengenai Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai pemilih rasional, penggerak isu publik, pelaku organisasi, sekaligus penjaga etika komunikasi digital. Akan tetapi, peran tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi politik, politik uang, disinformasi, polarisasi, dan partisipasi yang bersifat simbolik. Oleh karena itu, penguatan demokrasi perlu dilakukan melalui pendidikan politik kontekstual, literasi digital kritis, kaderisasi organisasi yang sehat, serta pengamalan nilai Pancasila sebagai dasar etika publik. Dengan dukungan lembaga pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas pemuda, generasi muda dapat menjadi warga negara yang aktif, kritis, etis, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

ABSTRACT

This article examines the role of young people in strengthening Indonesian democracy by positioning them not merely as voters during elections, but as civic actors who actively shape digital and social public spheres. The main issue discussed is how the large number of young voters and the intensive use of social media can be transformed into rational, critical, and responsible political participation. This study applies a qualitative method through a literature review approach. The sources include scholarly articles, official data from the General Election Commission, reports from the Indonesian Internet Service Providers Association, election-related hoax information from the Ministry of Communication and Information Technology, and references on Pancasila and civic education. The discussion shows that young people have a strategic role as rational voters, public issue mobilizers, organizational actors, and guardians of ethical digital communication. However, these roles are challenged by limited political literacy, vote buying, disinformation, polarization, and symbolic participation. Therefore, strengthening democracy requires contextual political education, critical digital literacy, healthy organizational regeneration, and the application of Pancasila values as the ethical foundation of public life. With the support of educational



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

institutions, government, civil society, and youth communities, young people can develop into active, critical, ethical citizens who are committed to the common good.

Pendahuluan

Perkembangan demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola komunikasi masyarakat. Jika sebelumnya informasi politik banyak bergerak melalui media massa konvensional, kini percakapan publik berlangsung lebih cepat melalui media sosial dan platform digital. Perubahan ini membuat demokrasi tidak hanya bekerja melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi juga melalui ruang percakapan sehari-hari yang membentuk cara warga memahami isu, menilai kandidat, menyampaikan kritik, serta membangun solidaritas. Dalam konteks tersebut, generasi muda memiliki posisi yang menonjol karena mereka termasuk kelompok yang paling dekat dengan teknologi digital (Faslah, 2025).

Data APJII (2024) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah melampaui 221 juta orang. Angka ini memperlihatkan bahwa kehidupan sosial-politik masyarakat semakin terhubung dengan ruang digital. Bagi generasi muda, internet bukan sekadar sarana hiburan, melainkan juga pintu masuk untuk memperoleh informasi politik, mengikuti diskusi publik, mengorganisasi gerakan, dan menyuarakan kepedulian terhadap isu sosial. Namun, kedekatan dengan teknologi tidak otomatis menghasilkan partisipasi demokratis yang berkualitas. Tanpa kemampuan memilah informasi, ruang digital justru dapat menjadi tempat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, dan propaganda politik.

Secara elektoral, posisi generasi muda juga sangat penting. KPU (2023a) menyebutkan bahwa pemilih muda mendominasi lebih dari separuh komposisi pemilih dalam Pemilu 2024, sementara jumlah daftar pemilih tetap secara nasional mencapai 204,8 juta pemilih (KPU, 2023b). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pilihan politik generasi muda berpengaruh besar terhadap arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Akan tetapi, kekuatan demografis ini baru memberi dampak positif apabila disertai kesadaran politik, literasi digital, dan komitmen etis sebagai warga negara.

Masalah yang muncul ialah masih adanya kesenjangan antara tingginya aktivitas digital pemuda dan kualitas literasi politik yang mereka miliki. Sebagian anak muda aktif membagikan informasi, mengikuti isu politik, atau berkomentar di media sosial, tetapi belum selalu memiliki kebiasaan memeriksa sumber, memahami konteks kebijakan, atau membedakan kritik rasional dari serangan personal. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap politik uang, kampanye emosional, disinformasi, serta partisipasi yang hanya bersifat simbolik. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai generasi muda dan demokrasi perlu diarahkan pada pertanyaan tentang bagaimana potensi besar tersebut dapat dikembangkan menjadi kekuatan demokratis yang substantif (Slamet et al., 2009).

Artikel ini bertujuan mengkaji peran generasi muda dalam memperkuat demokrasi Indonesia melalui empat fokus utama, yaitu partisipasi politik rasional, literasi digital, keterlibatan organisasi pemuda, dan aktualisasi nilai Pancasila. Keempat aspek tersebut

dipandang saling berhubungan. Partisipasi politik membutuhkan pengetahuan, literasi digital membantu pemuda menghadapi banjir informasi, organisasi menjadi ruang latihan demokrasi, sedangkan Pancasila memberi arah etis agar kebebasan politik tetap berpihak pada persatuan, keadilan, dan kemanusiaan

Pembahasan

Posisi Strategis Generasi Muda dalam Demokrasi Indonesia

Generasi muda menempati posisi strategis karena jumlahnya besar, mudah beradaptasi dengan teknologi, serta dekat dengan isu-isu sosial yang berkembang cepat. Dalam pemilu, mereka bukan lagi kelompok pelengkap, melainkan bagian penting yang dapat memengaruhi arah kebijakan publik. (Baskoro & Oskardo, 2025) menjelaskan bahwa kesadaran generasi muda dalam dunia politik menjadi unsur penting bagi keberlangsungan demokrasi. Dengan demikian, besarnya jumlah pemilih muda perlu dibaca sebagai peluang sekaligus tantangan.

Peluangnya terletak pada kemampuan pemuda untuk membawa isu publik ke ruang yang lebih luas. Isu mengenai pendidikan, lingkungan, antikorupsi, keadilan sosial, lapangan kerja, dan pelayanan publik sering kali memperoleh perhatian melalui gerakan anak muda di media sosial. Dalam posisi ini, generasi muda tidak hanya menerima informasi politik, tetapi juga memproduksi narasi, kritik, dan ajakan solidaritas. Mereka dapat berperan sebagai pen jembatan antara keresahan masyarakat dan agenda demokrasi yang lebih luas (Faslah, 2024).

Namun, posisi strategis tersebut tidak otomatis menghasilkan demokrasi yang sehat. Jumlah yang besar dapat menjadi kekuatan apabila disertai kemampuan berpikir kritis dan keberanian mengambil sikap berdasarkan informasi yang benar. Sebaliknya, apabila pemuda mudah diarahkan oleh propaganda, fanatisme, atau imbalan sesaat, maka kekuatan demografis tersebut dapat dimanfaatkan oleh elite politik untuk kepentingan sempit. Karena itu, kualitas partisipasi menjadi aspek yang lebih penting daripada sekadar jumlah partisipan.

Generasi Muda sebagai Pemilih Rasional

Peran dasar generasi muda dalam demokrasi ialah menjadi pemilih yang rasional. Pemilih rasional tidak menentukan pilihan hanya berdasarkan popularitas, kedekatan emosional, tekanan kelompok, atau pemberian materi, tetapi menilai gagasan, rekam jejak, integritas, kemampuan, dan program kandidat. Sikap ini penting karena pemilu bukan sekadar kegiatan lima tahunan, melainkan proses seleksi kekuasaan yang akan memengaruhi arah kebijakan negara (Pinandhita et al., 2025)

Pendidikan politik menjadi prasyarat utama bagi terbentuknya pemilih yang rasional. Pendidikan politik tidak harus selalu berlangsung dalam bentuk ceramah formal. Ia dapat dilakukan melalui forum diskusi, debat publik, kajian isu kebijakan, simulasi pemilu, komunitas literasi, maupun konten edukatif yang mudah diakses anak muda. (Baskoro & Oskardo, 2025) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran demokratis remaja ketika dikaitkan dengan praktik

diskusi, simulasi, dan studi kasus. Dengan pendekatan seperti itu, pemuda dilatih memahami isu, membandingkan informasi, dan menilai kebijakan secara lebih argumentatif.

Pemilih rasional juga memerlukan keberanian menolak politik uang. Politik uang merusak demokrasi karena mengubah hak pilih menjadi transaksi jangka pendek. Jika pilihan politik ditentukan oleh pemberian materi, maka pertimbangan terhadap kualitas program dan kepentingan publik menjadi lemah. Oleh sebab itu, generasi muda perlu menempatkan hak pilih sebagai tanggung jawab moral, bukan hanya hak administratif. Suara pemuda seharusnya menjadi sarana untuk mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel, bukan sekadar alat tukar dalam kompetisi elektoral.

Generasi Muda dalam Demokrasi Digital

Demokrasi digital membuka peluang baru bagi generasi muda untuk terlibat dalam kehidupan politik. Media sosial memungkinkan anak muda mengikuti informasi publik, mengkritik kebijakan, mengampanyekan isu, membangun komunitas, dan menggalang dukungan dengan biaya yang relatif rendah. (Baskoro & Oskardo, 2025) menunjukkan bahwa demokrasi digital di kalangan pemuda berkaitan dengan kepercayaan, optimisme, serta akses terhadap kepemimpinan muda. Artinya, ruang digital dapat memperluas partisipasi, terutama bagi mereka yang belum memiliki akses langsung ke partai politik atau institusi formal.

Meskipun demikian, ruang digital tidak selalu bersifat demokratis secara otomatis. Algoritma media sosial sering mendorong konten yang menarik perhatian, termasuk konten emosional, provokatif, atau sensasional. Akibatnya, keterlibatan politik di media sosial dapat berubah menjadi partisipasi performatif, yaitu terlihat aktif secara simbolik tetapi tidak disertai pemahaman mendalam. (Ida et al., 2025) juga menegaskan bahwa praktik komunikasi politik pemuda di media sosial perlu dibaca secara kritis karena ruang digital mengandung peluang sekaligus risiko.

Oleh karena itu, demokrasi digital membutuhkan etika komunikasi. Generasi muda perlu membiasakan diri menyampaikan kritik dengan argumen yang jelas, menghormati perbedaan, menghindari doxxing, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menahan diri dari membagikan informasi yang belum terverifikasi. Kebebasan berekspresi tetap penting, tetapi kebebasan tersebut perlu dijalankan dengan tanggung jawab agar ruang digital tidak berubah menjadi arena konflik yang merusak kepercayaan publik.

Menangkal Hoaks dan Disinformasi Politik

Hoaks dan disinformasi menjadi ancaman serius bagi demokrasi karena keputusan politik warga sangat bergantung pada kualitas informasi yang mereka terima. Informasi palsu dapat membentuk persepsi keliru mengenai calon, lembaga negara, kelompok masyarakat, maupun proses pemilu. Dalam situasi politik yang kompetitif, disinformasi dapat memperkuat polarisasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. (Saud et al., 2020) mencatat adanya penanganan ratusan isu hoaks terkait Pemilu 2024, sehingga literasi informasi menjadi kebutuhan mendesak dalam demokrasi digital.

Generasi muda dapat mengambil peran penting sebagai penggerak budaya verifikasi. Tindakan sederhana seperti memeriksa sumber berita, membaca lebih dari satu rujukan, menelusuri konteks informasi, memakai kanal cek fakta, dan tidak langsung membagikan pesan berantai merupakan langkah yang berdampak besar. Jika kebiasaan ini dilakukan secara luas, ruang digital akan menjadi lebih sehat karena penyebaran informasi palsu dapat ditekan sejak dari lingkungan keluarga, kampus, organisasi, dan komunitas.(Waskita, 2025)

Literasi digital dalam konteks demokrasi tidak hanya berarti mampu menggunakan perangkat teknologi. Lebih dari itu, literasi digital mencakup kemampuan memahami motif informasi, mengenali manipulasi visual, membaca bias media, menjaga keamanan data pribadi, dan menilai apakah suatu informasi layak dipercaya. Dengan kemampuan tersebut, generasi muda dapat menjadi pelindung kualitas ruang publik. Mereka tidak hanya menjadi pengguna internet, tetapi juga warga digital yang bertanggung jawab.(Turahmi et al., 2025)

Organisasi Mahasiswa dan Komunitas Pemuda sebagai Ruang Latihan Demokrasi

Organisasi mahasiswa dan komunitas pemuda merupakan ruang penting untuk melatih praktik demokrasi secara langsung. Di dalam organisasi, anak muda belajar menyampaikan pendapat, menyusun program, berdebat, bermusyawarah, menyelesaikan konflik, memimpin kegiatan, dan mempertanggungjawabkan keputusan. Pengalaman tersebut tidak selalu diperoleh melalui pembelajaran di kelas, padahal sangat diperlukan untuk membentuk warga negara yang aktif dan dewasa dalam kehidupan sosial.

Organisasi juga berfungsi sebagai jembatan antara keresahan sosial dan tindakan kolektif. Isu seperti biaya pendidikan, kekerasan seksual, lingkungan, pelayanan publik, dan transparansi kebijakan dapat diadvokasi secara lebih sistematis melalui organisasi. (Denis Irwandi et al., 2023)membahas konsep mental membangun sebagai dorongan untuk berkontribusi pada perubahan dan mengatasi hambatan sosial. Dalam konteks demokrasi, mental membangun berarti pemuda tidak berhenti pada kritik, tetapi juga menawarkan gagasan, membangun jaringan, dan mengawal perubahan secara bertanggung jawab.(Saud et al., 2020)

Agar organisasi benar-benar menjadi ruang pendidikan demokrasi, budaya kaderisasi perlu diarahkan secara sehat. Organisasi pemuda sebaiknya tidak hanya mengejar kegiatan seremonial, tetapi juga membangun tradisi membaca, menulis, berdiskusi, menyusun data, dan melakukan advokasi berbasis bukti. Kaderisasi seperti ini membuat pemuda terbiasa mengambil keputusan melalui argumentasi dan musyawarah, bukan melalui tekanan senioritas, dominasi kelompok, atau loyalitas buta. Dengan demikian, organisasi menjadi laboratorium demokrasi sebelum pemuda memasuki ruang publik yang lebih luas.

Pancasila sebagai Dasar Etika Demokrasi Generasi Muda

Demokrasi membutuhkan kebebasan, tetapi kebebasan harus disertai etika agar tidak berubah menjadi konflik yang merusak persatuan. Dalam konteks Indonesia,

Pancasila dapat menjadi dasar moral bagi partisipasi politik generasi muda. Nilai Ketuhanan mendorong kejujuran dan tanggung jawab moral; Kemanusiaan menuntut penghormatan terhadap martabat manusia; Persatuan mengingatkan pentingnya menjaga kohesi sosial; Kerakyatan menegaskan musyawarah; sedangkan Keadilan Sosial mengarahkan demokrasi pada kesejahteraan bersama.

(Faslah, 2025) menegaskan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi perlu diterapkan sebagai pedoman hidup berbangsa. , juga menunjukkan pentingnya penguatan dasar negara melalui penyuluhan Pancasila kepada mahasiswa. Dalam pembahasan ini, Pancasila tidak ditempatkan sebagai hafalan ideologis, melainkan sebagai kompas etis bagi pemuda ketika memilih pemimpin, berdiskusi, mengkritik kebijakan, berorganisasi, dan berkomunikasi di media sosial.

Aktualisasi Pancasila dalam demokrasi generasi muda dapat terlihat dari cara mereka menghormati perbedaan, menolak kekerasan, mengutamakan musyawarah, serta memperjuangkan keadilan sosial. Sikap kritis tetap diperlukan, tetapi kritik perlu diarahkan untuk memperbaiki keadaan, bukan memperdalam kebencian. Dengan landasan ini, generasi muda dapat menjadi aktor demokrasi yang berani bersuara sekaligus mampu menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

Tantangan dan Strategi Penguatan Peran Generasi Muda

Tantangan yang dihadapi generasi muda dalam memperkuat demokrasi meliputi rendahnya literasi politik, politik uang, apatisisme, polarisasi media sosial, budaya ikut-ikutan, pragmatisme, dan terbatasnya ruang partisipasi bermakna. Apatisme muncul ketika politik dianggap hanya milik elite, sementara politik uang membuat pilihan warga kehilangan dasar rasional. Di sisi lain, polarisasi digital dapat membuat pemuda terjebak dalam ruang gema yang hanya memperkuat pandangan kelompoknya sendiri dan menolak pandangan berbeda. (Saad et al., 2020)

Strategi penguatan peran pemuda perlu dilakukan secara bertahap dan kolaboratif. Pertama, pendidikan politik harus dibuat dekat dengan kehidupan anak muda, seperti isu pekerjaan, biaya pendidikan, lingkungan, korupsi, layanan publik, dan kesetaraan akses. Kedua, literasi digital perlu diarahkan pada kemampuan verifikasi informasi, etika komunikasi, keamanan data, dan pemahaman terhadap cara kerja algoritma media sosial. Ketiga, organisasi mahasiswa dan komunitas pemuda perlu diberi ruang dialog dengan kampus, pemerintah, dan masyarakat sipil. Keempat, pendidikan Pancasila perlu dikemas secara aplikatif agar tidak berhenti sebagai hafalan, tetapi menjadi prinsip dalam tindakan demokratis sehari-hari.

Kolaborasi antarlembaga juga penting. Kampus dapat menyediakan forum debat, kelas kebijakan, dan ruang kajian publik. Pemerintah dapat membuka kanal partisipasi yang ramah pemuda, transparan, dan mudah diakses. Organisasi masyarakat sipil dapat mengembangkan program cek fakta, pendidikan pemilih, dan advokasi berbasis data. Sementara itu, media dapat memperbanyak konten politik yang edukatif dan tidak hanya mengejar sensasi. Jika ekosistem ini berjalan, generasi muda akan lebih siap menjadi warga negara aktif yang kritis dan bertanggung jawab.

Program penguatan pemuda perlu disertai evaluasi. Keberhasilan pendidikan politik tidak cukup diukur dari banyaknya peserta kegiatan, tetapi juga dari perubahan kemampuan pemuda dalam menilai informasi, menyampaikan argumen, memahami isu publik, dan terlibat dalam aktivitas sosial. Sekolah, kampus, komunitas, dan pemerintah daerah dapat mengembangkan indikator sederhana, misalnya keaktifan diskusi, produksi konten edukatif, keterlibatan dalam forum warga, dan kemampuan melakukan cek fakta. Dengan evaluasi seperti itu, penguatan peran generasi muda tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi agenda yang hasilnya dapat dilihat.

Kesimpulan dan Saran

Generasi muda memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia karena mereka dominan secara demografis, aktif dalam ruang digital, dan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial. Peran tersebut terlihat dalam kemampuan menjadi pemilih rasional, warga digital yang kritis, penggerak organisasi, serta agen literasi politik yang mampu menahan penyebaran hoaks dan disinformasi. Akan tetapi, potensi tersebut menghadapi tantangan berupa apatisisme, politik uang, rendahnya literasi politik, polarisasi digital, dan pragmatisme politik.

Penguatan demokrasi perlu diarahkan pada pendidikan politik yang kontekstual, literasi digital kritis, kaderisasi organisasi yang sehat, pelibatan pemuda dalam forum publik, dan aktualisasi Pancasila sebagai etika demokrasi. Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai penguat nilai agar partisipasi generasi muda tetap menjunjung persatuan, keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan demikian, demokrasi Indonesia akan semakin kuat apabila generasi muda tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga berkembang sebagai warga negara yang aktif, kritis, etis, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Daftar Pustaka

- Baskoro, A., & Oskardo, D. (2025). Demokrasi Digital di Tangan Pemuda: Kepercayaan, Optimisme dan Aksesibilitas Kepemimpinan Muda di Indonesia. *Jurnal Pemuda Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.65125/febbjc88>
- Denis Irwandi, M., Akbar, R., & Santa, R. (2023). Analisis Kesadaran Generasi Muda Indonesia Dalam Dunia Politik. *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)*, 2(1), 107–116. <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.82>
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, Geostrategi, Dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan Dan Kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Ida, R., Mashud, M., Saud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2025). Politics in Indonesia: Democracy, social networks and youth political participation. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2432071. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2432071>

- Pinandhita, P., Rafa', & Damayanti, L. V. (2025). Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Generasi Muda Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(2), 558–561.
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). The Social Media and Digitalization of Political Participation in Youths: An Indonesian Perspective. *Society*, 8(1), 83–93. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160>
- Slamet, S., Hamdan, A. R. B., & Deraman, A. (2009). E-Demokrasi di Indonesia, Antara Peluang dan Hambatan Pendekatan Fenomenologis. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/>
- Turahmi, H., Azizah, Z., & Mutia, C. E. (2025). Peran Pemuda dalam Mewujudkan Demokrasi Digital: Analisis Praktik Komunikasi Politik di Media Sosial. *Sagita Academia Journal*, 3(4), 106–113. <https://doi.org/10.61579/sagita.v3i4.703>
- Waskita, D. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(1), 1–6.